

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Islam di antara Modernisme dan Posmodernisme

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Sutikno
Publisher	UIN Sunan Ampel
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-06 11:17:05
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/237146

Islam di antara Modernisme dan Posmodernisme

Sutikno

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Drajat (STAJIDRA),

Lamongan

caksutikno3@gmail.com

Abstract

Analyzing over modernism and postmodernism depict that both terms are conceived as a period or the phase of civilization that runs synchronically in one side and diachronic in other side. Synchronization from modernism to post-modernism constitutes the continuity of modernism as ongoing project. Meanwhile, diachronic approach is more describing that various critic and contestation toward modernity. In relation with this phase, the discourse of Islamic post-modernism has been rising before decades based on the complexity of cultural problems in the West, especially relating to the impact of modernity. Critics to modernity are not only because of social projects within culture but also of philosophical basis and root. Progress of mind achieved by Western society has eventually become a critic for modernity. Religion that is transforming from collective consciousness to private consciousness enhanced to be a new spirituality within the complexity of modernity. As an important part of global structure, Islam was also influenced by the impact of modernity. That is a logical consequence of dialectical process with Western culture, especially politics—such as system of democracy in the Muslim states. Religious fundamentalism is a response against Western modernity which is considered as in contradiction of Islamic values. This article focuses on critics to modernity, the rising of postmodernism, Islamic postmodernism and the essentials of postmodernism.

Keywords: Postmodernism, Islam, Modernity.

Pendahuluan

Analisis atas modernisme dan posmodernisme menggambarkan bahwa keduanya dipahami sebagai suatu periode atau tahap peradaban yang berjalan secara sinkronis pada satu sisi dan diakronis pada sisi lain. Sinkronisasi dari modernisme menuju posmodernisme merupakan argumentasi yang hampir sama sebagaimana ditegaskan oleh Jurgen Habermas bahwa posmodernisme merupakan kelanjutan dari modernisme sebagai proyek yang masih berlanjut.¹ Sementara pendekatan diakronis lebih menggambarkan bahwa terjadi berbagai kritik dan perlawanan terhadap modernitas. Kritik dan perlawanan tersebut tidak bisa mengabaikan asal usul modernitas yang bermula pada abad ke-16; sebuah kritik yang dilancarkan terhadap landasan dan pijakan modernitas berupa kebangkitan akal budi setelah melakukan perlawanan dengan otoritas gereja yang masih mempertahankan doktrin dan dogma yang oleh Comte disebut sebagai tahap teologis dan metafisik.² Kritik atas modernitas tersebut kemudian terus berlanjut seiring dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai namun pada sisi lain menyimpan pula berbagai potensi yang mengarah pada dehumanisasi dalam konteks sosial dan budaya,³ dominasi rasio instrumental sebagai bentuk penguburan dan pengabaian dimensi metafisik dan transendental⁴ dan sebagainya. Sebagai deskripsi atas perlawanan terhadap otoritas gereja serta pencapaian kemenangan atas rasio dan akal budi, maka era pencerahan mengandung beberapa konsepsi atau ide dasar yang kemudian menjadi pijakan bagi proyek modernitas.

Dalam pandangan Hamilton, terdapat kesepakatan beberapa pemikir atau filosof tentang era pencerahan yang mengandung beberapa konsepsi dasar sebagai berikut; *pertama*, rasio. Sebagian filosof memosisikan rasio dan rasionalitas sebagai langkah untuk mengorganisasi

¹ Jurgen Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1987), 3.

² Frans Magnus Suseno, *Pijar – pijar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 11-14.

³ Lihat Eric Fromm, *Marxist Theory of Man* (London: Polity Press, 2004), Eric Fromm, *Revolusi Harapan*, terj. Kamdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 10.

⁴ Frans Magnus Suseno, *Pijar – pijar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 11.

pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman dan eksperimen. Dari sini maka mereka menyebut “rasionalis” sebagai konsep yang berasal dari proses rasional; yakni bersifat jelas, gagasan dari pengalaman independen yang bisa didemonstrasikan pada pihak lain. Pandangan ini dipegang oleh Descartes dan Pascal. *Kedua*, empirisme. Empirisme merupakan gagasan yang menyatakan bahwa pemikiran dan pengetahuan mengenai dunia alam dan sosial harus didasarkan pada fakta empiris serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan manusia harus bisa dipahami melalui organ rasa. *Ketiga*, Pengetahuan. Yang disebut sebagai pengetahuan ilmiah adalah didasarkan pada metode eksperimental sebagai berkembang dalam revolusi ilmiah yang terjadi pada abad ke-17.

Keempat, universalisme. Universalisme menegaskan bahwa konsep rasio dan ilmu pengetahuan harus bisa diterapkan dalam berbagai situasi serta mengandung prinsip-prinsip yang sama dalam setiap situasi. Ilmu secara khusus menghasilkan aturan yang berlaku umum dalam mengatur tatanan semesta. *Kelima*, kemajuan. Gagasan bahwa kondisi sosial dan natural dari kehidupan manusia dapat diperbaiki dan dikembangkan melalui penerapan ilmu dan akal serta akan menghasilkan tingkat kebahagiaan secara maksimal. *Keenam*, individualisme. Konsep bahwa individu merupakan titik awal bagi semua pengetahuan dan tindakan. Masyarakat merupakan produk dari pemikiran dan tindakan dari sejumlah individu yang bersifat luas. *Ketujuh*, toleransi. Toleransi merupakan suatu perasaan yang menegaskan bahwa kehidupan semua manusia secara esensial adalah sama meski terjadi perbedaan agama dan ikatan moral. *Kedelapan*, kebebasan. Konsep kebebasan merupakan kontradiksi dari ikatan feodal dan tradisional yang berpusat pada keyakinan, perdagangan, komunikasi, interaksi sosial, seksualitas dan kepemilikan kekayaan. Titik tekan konsep kebebasan tersebut kemudian berkembang meliputi kebebasan bagi kaum perempuan dan kaum menengah ke bawah. *Kesembilan*, sekularisme. Sekularisme seringkali dipahami sebagai bentuk anti klerikal sekaligus lawan dari otoritas

keagamaan tradisional yang menekankan pada pengetahuan sekuler yang bebas dari ortodoksi keagamaan.⁵

Konsepsi dasar era pencerahan yang dikemukakan di atas mengalami perkembangan signifikan sekaligus menjadi kritik dari berbagai kalangan. Hal ini dilatarbelakangi bahwa konsepsi dasar pencerahan di atas melalui proyek modernitas tidak saja sebagai ide yang bersifat kognitif namun lebih jauh mengalami proses ideologisasi sedemikian rupa. Rasionalisme dan empirisme tidak sekedar menggambarkan rangkaian proses epistemis dan ontologis dalam dimensi keilmuan namun sebagaimana dikemukakan oleh Habermas dan Hardiman, mengandung selubung ideologis untuk memaksakan bahwa kebenaran adalah sebagaimana dicerminkan dalam prinsip-prinsip rasionalisme dan empirisme.⁶

Di samping itu, sekularisme menjadi persoalan penting yang tidak saja disebut sebagai anak kandung modernitas namun juga merupakan titik awal lahirnya kompleksitas problematik dengan memosisikan agama tidak lagi sebagai sumber etika dan norma yang bersifat umum namun lebih jauh memosisikan agama sebagai ruang privat dan bersifat personal.⁷ Dalam konteks yang lebih luas, implikasi sekularisme merambah ke dalam berbagai medan dan arena terutama politik, sosial dan keagamaan. Beberapa implikasi yang ditimbulkan oleh proyek modernitas yang berlandaskan pada konsepsi dasar era pencerahan di atas tentu tidak bisa dipahami secara statis. Dengan kata lain, perjalanan modernitas sendiri menampakkan proses dinamika yang sangat menarik terutama ditandai dengan lahirnya globalisasi sebagai era dan periode yang berpusat pada fungsionalisasi informasi dan komunikasi.

Identifikasi terhadap modernisme untuk membedakan dengan era tradisionalisme dijabarkan secara luas oleh Daniel Bell. Meski lebih

⁵ Peter Hamilton, "The Enlightenment and The Birth of Social Sciences", dalam Stuart Hall, David Held, Don Hubert and Kenneth Thompson, (ed.), *Modernity : An Introduction to Modern Societies* (Cambridge: Blackwell Publisher, 1996), 23–24.

⁶ Jurgen Habermas, *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, terj. Hasan Basri (Jakarta: LP3ES, 1984), F Budi Hardiman, *Melampaui Positifisme dan Modernitas* (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 34.

⁷ Frans Magnus Suseno, *Pijar-pijar Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 13.

terfokus pada aspek ekonomi dengan mengangkat berbagai kritik yang dilakukan oleh Marx terhadap kapitalisme sebagai semangat yang dikandung oleh industrialisme, Bell justru menilai bahwa telah muncul apa yang disebut sebagai masyarakat pos industrial (*post-industrial society*).⁸ Masyarakat industri ditandai dengan lahirnya berbagai sistem sosial yang berbeda di mana perbedaan dengan masyarakat pra-industrial terletak bahwa berbagai sistem sosial tersebut bersifat ekstraktif. Sementara dalam masyarakat industrial, berbagai sistem tersebut dapat diseragamkan melalui suatu proses yang bersifat fabrikatif terutama rekayasa sosial dan sebagainya.

Lebih jauh menurut Bell, terdapat beberapa dimensi baru tentang masyarakat pos industrial. *Pertama, centrality of theoretical knowledge.* Sentralisasi ini lebih menekankan bahwa pengetahuan teoretis harus menunjang dan bahkan menjadi pijakan utama terhadap inovasi-inovasi teknologi. Pijakan bagi inovasi teknologi tersebut pada gilirannya akan melahirkan industri berbasis pada ilmu pengetahuan. *Kedua, The creation of a new intellectual knowledge.* Ini dijalankan dengan langkah penyebaran teknik ekonomi dan matematika baru yang berbasis pada pemrograman linear komputer yang difungsikan sebagai sarana simulasi dan alat ukur bagi analisis sistem maupun teori kebijakan agar lebih efisien serta bagi pengembangan rekayasa sosial dan ekonomi untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. *Ketiga, The spread of knowledge class.* Pertumbuhan paling cepat yang terjadi di masyarakat adalah lahirnya kekuatan atau kelas terdidik secara teknis dan profesional. *Keempat, The Change from goods to service.* Dalam masyarakat pos industri, pelayanan baru adalah berbasis manusia terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan sosial serta menuntut tingkat kecakapan dan profesionalitas dengan fungsionalitas teknologi melalui penelitian, evaluasi, komputer dan analisis sistem. *Kelima, A Change in the character of work.* Dalam masyarakat pos industrial, kerja merupakan suatu permainan antar individu yang digambarkan seperti birokrat dengan klien, dokter dengan pasien, guru dengan murid. *Keenam, The role of women. Ketujuh, Science as Imago. Kedelapan,*

⁸ Barry Smart, "Modernitas, Posmodernitas dan Masa Kini," dalam Bryan S Turner, *Teori teori Sosiologi Modernitas dan Posmodernitas*, terj. Imam Baehaqi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 30.

*Situses as political units. Sembilan, Meritocracy. Sepuluh, The end of scarcity. Sebelas, The economic of information.*⁹ Beberapa karakteristik masyarakat pos industrial yang dikemukakan oleh Bell di atas memang tampak ambivalen, terutama oleh beberapa pengkritik yang menganggap bahwa terdapat hubungan antara konsep masyarakat pos-industrial dengan kapitalisme. Sementara sebagian yang lain menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan antar keduanya. Hal ini ditegaskan oleh Bell bahwa skema masyarakat pos-industrial lebih mengarah pada dimensi teknis-sosial dalam masyarakat sementara kapitalisme lebih sebagai dimensi ekonomi dan sosial.¹⁰

Konsep-konsep Posmodernisme

Deskripsi atas prinsip yang berlaku pada masa pencerahan berikut karakteristik masyarakat pos-industrial sebagai anak kandung modernitas yang lebih menitikberatkan pada dimensi sosial dan ekonomi yang ditunjang dengan kemampuan teknis dan profesionalitas sebagaimana dikemukakan di atas secara sosiologis sebenarnya telah memberikan gambaran yang demikian kompleks. Lahirnya posmodernisme sejauh ini telah menampakkan sikap ambisius dalam memberikan kritik terhadap modernitas dengan mencoba melakukan telaah dan kritik atas berbagai dimensi yang terkandung dalam modernitas tersebut. Tidak jauh dengan modernisme, kritik posmodernisme juga dimulai dari beberapa aspek yang terkandung dalam wilayah filsafat, seni dan sastra, sosiologi, politik dan juga keagamaan. Untuk aspek yang terakhir, dimensi keagamaan dalam masyarakat modern yang menjadi subjek kritik kalangan posmodernis sering kali berpijak pada berbagai argumentasi yang dibangun oleh Herbert Marcuse dan Eric Fromm tentang alienasi yang meski pada mulanya diposisikan dalam konteks ekonomi namun kemudian difungsikan sebagai perangkat analisis untuk menggambarkan dimensi spiritualitas. Beberapa pemikir mulai dari Suseno, Griffin, Nasr dan lainnya mempertegas bahwa

⁹ Daniel Bell, "The Coming of Post – Industrial Society" dalam Lawrence E Cahoone, *From Modernism to Postmodernism* (Cambridge: Blackwell Publisher, 1996), 429–431.

¹⁰ *Ibid.*, 424.

masyarakat modern dengan corak industrialis berikut prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semangat pencerahan menimbulkan keterasingan, kegersangan spiritual dan sebagainya.¹¹

Langkah yang ditempuh oleh sebagian masyarakat Barat menuju pada pencapaian kesadaran rohani yang bersifat metafisik dan transendental dengan jalan mendekati dan mempelajari berbagai praktik dan tradisi keagamaan baik yang bersifat konvensional maupun spiritual. Di kalangan pemikir muslim, ketertarikan sebagian masyarakat Barat terhadap Islam menampakkan perkembangan signifikan meski pernah terjadi peristiwa 11/9 beberapa tahun silam. Sementara bagi Griffin, lahirnya teologi spiritualitas baru merupakan bentuk gejala posmodernisme yang dalam tingkat tertentu menggambarkan kritik keras terhadap proyek modernitas. Teologi spiritualitas tersebut merupakan dimensi spiritualitas yang tidak saja berangkat dari salah satu ajaran keagamaan, bahkan lebih jauh menitikberatkan pada semua wujud spiritualitas masing-masing agama, terutama yang berasal dari Timur.¹²

Dalam arena politik, terdapat berbagai gugatan yang diarahkan pada demokrasi; suatu sistem sekaligus ideologi politik yang selama beberapa dekade diterima tanpa syarat oleh sebagian besar negara di dunia, terutama dunia Islam. Gugatan terhadap demokrasi yang dinilai sebagai anak kandung modernitas Barat lebih terkonsentrasi pada persoalan legitimasi politik yang terjadi di institusi kekuasaan dan kemudian merambah pada berbagai wilayah. Legitimasi dan otoritas politik tersebut berkaitan dengan sistem atau model representasi yang ditawarkan oleh demokrasi sebagai suatu mekanisme dan sistem pengambilan keputusan yang menyimpan berbagai distorsi dan potensi yang justru tidak demokratis. Dalam institusi kekuasaan, mayoritas kerap kali dijadikan sebagai sumber legitimasi bagi pemberlakuan suatu keputusan dengan jalan mengabaikan kekuatan minoritas. Persoalan ini sebelumnya pernah disuarakan oleh Arendt yang menegaskan bahwa

¹¹ David Ray Griffin, ed, *God and Religion in the Postmodern World* (Albany: State University of New York Press, 1989), 1.

¹² Hans Kung, *Theology for the Third Millennium* (New York: Doubleday Publishing, 1989), 6–11., Hans Kung, *Etika Ekonomi Politik Global*, terj. A Noer Zaman (Yogyakarta: Qalam, 2002), 19.

demokrasi sebagai anak kandung modernitas juga mengandung potensi otoritarianisme yang dipresentasikan oleh hegemoni kekuatan mayoritas terhadap minoritas.

Gagasan Arendt ini kemudian dikembangkan oleh Habermas yang lebih menitikberatkan pada konsep rasionalisasi dan tindakan komunikasi. Menurut Habermas, demokrasi deliberatif merupakan pendekatan yang tidak saja mencakup bagaimana tindakan komunikasi itu dilakukan melalui proses wacana tanpa pretensi, namun lebih jauh mengharuskan eksplorasi dan artikulasi ideologis setiap aktor guna menghasilkan suatu konsensus yang berangkat dari kesadaran etis dan transendental.¹³ Pandangan ini sebenarnya menggambarkan pengaruh Kantian dalam diri Habermas di mana Kant sejak awal memang mengalami kekecewaan terhadap pencerahan untuk kemudian mengangkat kembali dimensi metafisik baik dalam wilayah etis maupun kesadaran intersubjektif.¹⁴ Dengan kata lain, demokrasi deliberatif bukan sekedar sebagai bentuk praktik rasio dan nalar dengan mengangkat berbagai narasi besar namun lebih jauh melibatkan kesadaran etis yang bersifat metafisik dan intersubjektif.

Kritik lain yang diarahkan terhadap modernitas akibat berbagai konsekuensi yang ditimbulkan di samping dalam arena politik, terutama implikasi demokrasi, juga mencakup dimensi lain yang bersifat makro. Konsekuensi modernitas yang mengandung potensi negatif ditegaskan oleh Sugiarto yang mencakup antara lain: *pertama*, pandangan dualistis modernisme yang sengaja memisahkan antara subjek-objek, spiritual-material, manusia-dunia dan sebagainya. menurut Hekman, dualisme tersebut merupakan bentuk demarkasi yang memang khas bernuansa pencerahan Barat dan digemari oleh sains yang mencakup antara ilusi dan fakta, antara fiksi dan kebenaran ilmiah, dan antara prasangka subjektif dan pengetahuan objektif.¹⁵ *Kedua*, pandangan modernisme yang bersifat positivistik dan objektif. *Ketiga*, dalam modernisme maka ilmu-ilmu yang bercorak positif-empiris menjadi otoritas kebenaran

¹³ F Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 67.

¹⁴ F Budi Hardiman, *Filsafat Modern* (Jakarta: Gramedia, 2007), 9.

¹⁵ SJ Hekman, *Hermeneutics and the Sociology of Knowledge* (Cambridge and Oxford: Polity Press, 1986), 4–7.

tertinggi. *Keempat*, disorientasi moral religius yang mengakibatkan meningkatnya kekerasan, alienasi dan sebagainya. *Kelima*, materialisme. Konsekuensi ini menggambarkan bahwa kapital menjadi ukuran segalanya sehingga kerap kali melahirkan Darwinisme sosial yang menegaskan bahwa kekuatan seleksi alam bagi keberlangsungan hidup ditentukan oleh akumulasi kapital dan di luar itu, akan menjadi korban (*survival of the fittest*).¹⁶ Sementara dalam pandangan Kung, konsekuensi modernitas diwujudkan dengan krisis kebijaksanaan di tengah kemajuan ilmu pengetahuan, krisis spiritual di tengah kemajuan teknologi dan krisis moralitas di tengah kemajuan demokrasi.¹⁷

Untuk lebih memfokuskan perhatian terhadap posmodernisme dibalik berbagai kritikan yang dilancarkan pada modernisme berikut proyek modernitasnya di atas, maka diperlukan beberapa konsep dan gagasan tentang posmodernisme tersebut. Menurut Kevin O'Donnell, istilah posmodernisme digunakan pertama kali oleh para seniman di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk menyebut sebagai gerakan baru yang membebaskan diri dari orde lama. Istilah posmodernisme tersebut kemudian cepat menyebar ke berbagai disiplin ilmu. Sementara Charles Jenks dalam karyanya, *The Language of Post-Modern Architecture* merumuskan beberapa unsur kunci dalam suasana posmodern: simplifikasi modernis, gaya minimalis dan bergaya universal diolah kembali dengan lebih dekoratif, pencampuran berbagai gaya dan zaman secara ironis dan menghindari dominasi gaya oleh para arsitek. Dalam bidang ini, semangat posmodernis menggambarkan perbedaan tajam dengan orde sebelumnya dan menganggap bahwa tren modern dapat diakses tanpa harus mendominasi. Dalam gambaran ini, O'Donnell juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap posmodernisme tidak akan bisa dilakukan tanpa memahami modernisme meski yang pertama telah berusaha melampaui yang kedua.¹⁸

¹⁶ Bambang Sugiharto, *Posmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 29–30.

¹⁷ Hans Kung, "Towards a World Ethic of World Religion: Fundamental Questions of Present – Day Ethics in a Global Context," dalam *Concilium* 2, tahun 1990, 104.

¹⁸ Kevin O'Donnell, *Postmodernism* (Oxford: Lion Publishing, 2003), 8–9 .

Dimensi filsafat sebagai salah satu objek kritik bagi kaum posmodernis merupakan langkah penting sebab modernisme sendiri merupakan produk era pencerahan yang dibangun melalui landasan filsafat positivisme dan empirisme. Dalam tradisi posmodernisme, beberapa pemikir atau filosof yang dinilai sebagai posmodernis sejauh ini dinilai berdasarkan pada kecenderungan filosofisnya terhadap produk modernitas berikut implikasi yang ditimbulkan. Beberapa nama yang dipresentasikan oleh O'Donnell misalnya, dinilai sebagai pemikir kunci bagi pengembangan pemikiran posmodernisme meskipun yang bersangkutan menolak disebut sebagai posmodernis. Beberapa nama tersebut antara lain; Roland Barthes, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Luce Irigaray, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Immanuel Levinas dan Jean Francois Lyotard.¹⁹ Dalam karyanya, *The Postmodern Condition*, Lyotard melakukan serangan terhadap mitos yang melegitimasi narasi agung (zaman modern) berikut janji dan harapan yang diberikan ; pembebasan manusia, progresivitas ilmu dan peradaban Barat sebagai pembawa kesejahteraan berikut pengetahuan valid yang berlaku dan bersifat universal.²⁰ Selain Foucault, beberapa pemikir lain di atas juga mengonsentrasikan pada wilayah keilmuan yang sangat spesifik dengan menggunakan perspektif baik pos - strukturalisme maupun posmodernisme.

Dalam konteks ilmu-ilmu sosial, kritik atas modernisme ditandai dengan bentuk dekonstruksi terhadap positivisme logis yang dikembangkan sebelumnya oleh Comte. menurut Rapaport, mazhab positivisme yang kemudian disebut dengan saintisme didasarkan pada empat asas etis universal; keyakinan akan adanya kebenaran objektif, keyakinan metodologis untuk mendekati kebenaran tersebut, keyakinan

¹⁹ Ibid., 24–27.

²⁰ Madan Sarup, *An Introductory Guide to Post – Structuralism and Postmodernism* (Georgia: The University of Georgia Press, 1993), 205. Dalam karya ini, Sarup menjabarkan konsepsi atau ide dasar beberapa pemikir strukturalis dan sekaligus posmodernis terhadap pemikir lain yang selama ini memberikan kontribusi penting bagi lahirnya modernisme atau modernitas. Lacan misalnya diposisikan sebagai penerus Freud meski konsep dasar pemikirannya yang disebut dengan teori cermin (*Mirror theory*) banyak meruntuhkan gagasan yang dikembangkan oleh Freud.

akan konsensus terhadap kebenaran tersebut dan keyakinan bahwa konsensus tersebut dapat dicapai tanpa paksaan.²¹ Sementara itu menurut Hindes, saintisme yang dikembangkan oleh Comte dan juga mazhab Wina mendasarkan pijakan epistemologinya berdasarkan pada doktrin fenomenalisme, yakni sebuah penegasan bahwa fondasi terakhir pengetahuan adalah pengalaman inderawi maka segala hal yang tidak berdasarkan pada pengalaman inderawi tersebut adalah omong kosong, terutama wacana tentang moral dan etika, metafisika, agama dan sebagainya. padahal menurut Hindes lebih jauh, terdapat kelemahan mendasar yang terkandung dalam paradigma saintisme tersebut. *Pertama*, terdapat beberapa kondisi yang merupakan pengalaman namun positivisme menolak itu sehingga terkesan bersifat dogmatis. *Kedua*, dengan mengimani bahwa fenomena faktual merupakan kebenaran sejati namun program pembasmian metafisika oleh kaum positivisme justru melahirkan metafisika diam-diam.²² Dalam ilmu-ilmu sosial, konsep posmodernisme memberikan arti bahwa batas-batas dunia modern telah tercapai, upaya untuk mengejar fondasi yang tak tergoyahkan bagi kebenaran analitis merupakan proyek yang sia-sia, suatu upaya yang akan tetap tidak sempurna selama pemikiran metafisik dalam inti filsafat Barat masih bersifat problematik.

Serangan tajam yang diarahkan terhadap modernisme atau modernitas di atas baik dalam konteks filsafat maupun ilmu sosial berkaitan dengan posisi metafisika dan atau teologi yang memang sejak awal telah dikubur oleh kaum positivisme logis. Mempertanyakan ulang dimensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian beberapa pemikir posmodernis untuk mengangkat kembali dimensi metafisika atau spiritualitas yang selama ini terabaikan. Menurut Joe Holland, respons berbagai agama terhadap proyek modernitas baik yang menjelma ke dalam sosialisme maupun kapitalisme hampir bersifat seragam. Lahirnya ideologi baik yang konservatif maupun fundamentalis merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri betapa konsekuensi dan implikasi yang ditimbulkan oleh modernitas telah menimbulkan persoalan besar.

²¹ Richards, *Philosophy and Sociology of Science* (Oxford: Basil Blackwell, tt), 147.

²² B. Hindes, *Philosophy and the Methodology of Social Sciences* (Sussex: The Harvester Press, 1977), 134.

Hadirnya posmodernisme yang secara agresif membongkar konstruksi modernitas juga terjadi pada wilayah teologis; suatu wilayah yang dimiliki oleh hampir semua agama. Meski demikian, kebangkitan dimensi teologis tersebut tidak saja menggambarkan dominasi kristiani sebagai agama yang tipikal Barat namun lebih jauh menampakkan distingsi tersendiri yang kerap disebut sebagai teologi natural.²³ Lebih jauh, Holland menawarkan empat visi prinsip yang mendasari spiritualitas posmodern. *Pertama*, keunggulan energi spiritual. *Kedua*, spiritualitas sebagai suatu pengejawantahan. *Ketiga*, alam sebagai pengejawantahan spiritualitas. *Keempat*, masyarakat sebagai upaya manusia memperluas spiritualitas alam.²⁴

Posmodernisme Islam

Wacana mengenai Islam dan posmodernisme juga memperlihatkan fenomena yang hampir sama sebagaimana di Barat. Dalam wacana tersebut, berbagai perspektif kaum posmodernis kerap kali difungsikan untuk memotret posisi Islam di dalamnya; posisi sebagai agama dalam dimensi teologi spiritualitas, Islam sebagai ideologi politik terutama semenjak munculnya tesis benturan peradaban (*the Clash of Civilization*) yang digagas oleh Huntington, perspektif posmodernisme bagi pengembangan pemikiran Islam terutama pendekatan yang dikembangkan baik oleh Mohammed Arkoun maupun al-Jabiri, dan sebagainya. Meski demikian, kajian atas Islam dan posmodernisme menurut Azra relatif langka dilakukan oleh kalangan pemikir muslim.²⁵ Beberapa pemikir muslim sebagaimana dikemukakan oleh Ahmed, masih memosisikan posmodernisme sebagai bentuk kelanjutan dari

²³ Joe Holland, "Visi Posmodern tentang Spiritualitas dan Masyarakat" dalam David Ray Griffin, *Visi-visi Posmodern: Spiritualitas dan Masyarakat*, terj. Gunawan A (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 72.

²⁴ *Ibid.*, 74.

²⁵ Azyyuardi Azra, "Pasca Modernisme, Islam dan Politik: Kecenderungan dan Relevansi" dalam *Jurnal UQ* Vol. 1 No 2 tahun 1995, 4–9.

modernisme Barat yang bersifat destruktif, terutama Amerikanisasi, nihilisme, anarki dan penghancuran.²⁶

Di kalangan dunia Islam, posmodernisme difungsikan sebagai alat kritik terhadap modernitas yang dilatarbelakangi oleh pengalaman kolonialisme yang terjadi di sebagian besar dunia Islam. Menurut Abdul Khadir Khatiby, kolonialisme Barat terhadap dunia Islam tidak saja bersifat politik melalui eksploitasi sumber daya alam dan sebagainya namun lebih jauh menggambarkan bentuk subversi pemikiran yang berdampak pada lahirnya masyarakat-masyarakat bisu di negara terjajah. Di sini Khatibi menegaskan bahwa gejala lahirnya dekolonisasi pemikiran merupakan bagian dari gejala posmodernisme di dunia Islam, terutama melalui perkembangan sastra poskolonialisme berikut teori lain yang sehaluan.²⁷ Bahkan dewasa ini, upaya atau langkah yang ditempuh oleh sebagian pemikir sosial muslim untuk membangun teori sosial dunia ketiga merupakan gejala atau fenomena yang sejalan dengan posmodernisme. Gagasan Farid Alatas untuk mengetengahkan wacana alternatif dalam teori-teori sosial khas dunia ketiga bertujuan untuk mengurangi dominasi dan hegemoni teori sosial modern Barat meski tidak menghilangkan secara total. Sebab bagaimanapun, fungsionalisasi teori sosial Barat masih diperlukan sebagai perangkat analitis dan eksploratif.²⁸

Di samping itu, hubungan antara Islam dengan posmodernisme juga tidak bisa dilepaskan dari gejala lahirnya ambiguitas baik sebagai implikasi modernitas sendiri dan tentunya, sebagai gejala yang mempengaruhi bagi pendefinisian posmodernisme. Menurut Ahmed, kehidupan dalam era posmodernisme tidak didasarkan pada citra yang jelas dan lebih jauh, menggambarkan bentuk kepanikan yang melingkupi kehidupan seks, seni, ideologi dan bahkan teori. Pemberontakan terhadap narasi agung sebagaimana digagas oleh Lyotard justru menggambarkan kebingungan dan kesulitan. Dari sini maka diperlukan identifikasi posmodernisme yang meski terdapat berbagai sumber namun tetap memerlukan penajaman karakter sosiologisnya. Menurut Ahmed,

²⁶ Ibid., 4.

²⁷ Ibid., 6.

²⁸ Farid Alatas, *Wacana Alternatif dalam Ilmu-ilmu Sosial* (Bandung: Mizan, 2007), 45.

posmodernisme sejauh ini mempunyai ciri sebagai berikut: *Pertama*, pemahaman atas era posmodernisme berarti mengasumsikan pertanyaan tentang hilangnya kepercayaan atas proyek modernitas berupa semangat pluralisme, sikap skeptis terhadap ortodoksi tradisional dan penolakan terhadap pandangan bahwa dunia merupakan totalitas universal dan terakhir, ketidakpercayaan terhadap solusi yang dijanjikan oleh modernitas. *Kedua*, posmodernisme bersamaan dengan era media ; dalam banyak cara yang bersifat mendasar, media adalah dinamika sentral, semangat zaman, cara pendefinisian terhadap posmodernisme. *Ketiga*, keterkaitan antara posmodernisme dengan revivalisme etno-religius atau fundamentalisme merupakan persoalan yang harus dikaji oleh kalangan ilmuwan sosial. Meski demikian, revivalisme sebagai gejala dalam era posmodernisme kembali memosisikannya sebagai produk dari media. *Keempat*, terdapat kontinuitas dengan masa lalu. *Kelima*, mengingat sebagian besar penduduk menempati wilayah perkotaan dan sebagian besar lagi masih dipengaruhi oleh ide-ide yang berkembang dari wilayah ini maka metropolis menjadi sentral bagi posmodernisme. *Keenam*, terdapat elemen kelas dalam posmodernisme dan demokrasi merupakan syarat mutlak bagi pengembangannya. *Ketujuh*, posmodernisme memberikan peluang dan bahkan mendorong penjajaran wacana, eklektisme dan percampuran berbagai citra. *Delapan*, ide tentang bahasa sederhana sering kali terlewatkan oleh kaum posmodernis meskipun mereka mengklaim dapat menjangkaunya.²⁹

Beberapa karakteristik posmodernisme yang digambarkan Ahmed di atas sejauh ini menampakkan relevansi dan signifikansinya di dunia Islam khususnya menyangkut interaksi antara Islam dengan Barat. Meski demikian, interaksi tersebut tidak bisa digeneralisasikan bahwa semua negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas muslim mempunyai kecenderungan yang sama. Di Indonesia, pengaruh modernitas baik dalam bidang politik maupun ekonomi memperlihatkan perbedaan dengan negara Islam lain yang dilatarbelakangi oleh faktor persepsi masyarakat muslim sendiri dalam memahami produk modernitas tersebut. Demokrasi politik yang meskipun mendapatkan respons keras

²⁹ Akbar S Ahmed, *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, terj. M Sirozi (Bandung: Mizan, 1996), 25–41.

hanya karena terpaku pada sistem representasi namun secara sosiologis dan politis justru semakin mengakar terutama doktrin tentang musyawarah sebagai pintu masuk menuju kemaslahatan. Di sini demokrasi, sebagaimana pujian Rahman terhadap Indonesia, menjadi perspektif utama bagi pengembangan penafsiran ajaran Islam yang lebih terbuka, pluralis dan toleran.³⁰

Respons atas demokrasi ini tentu berbeda dengan sebagian pemikir muslim di kawasan Arab atau Timur Tengah dan juga sebagian kecil di Indonesia yang mengalami proses transmisi ide dan gagasan kaum Salafis yang berpusat di Arab. Dalam perspektif posmodernis, respons dan protes atas proyek modernitas Barat memang tidak bisa berjalan secara total dan berlaku universal sehingga menggambarkan suatu kondisi yang bersifat diametral. Dalam pandangan As-syaukanie, terdapat antonimisasi atau kekontrasan istilah yang mengandung konsepsi dan ide dari modernisme dan posmodernisme.³¹ Meski modernisme menyuarakan kebenaran universal dan bahkan memaksakan berbagai nilai universal yang diproduksi oleh Barat namun tidak bisa mengabaikan bahwa di wilayah dunia lain terdapat kebenaran partikular yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Di sini universalitas dikontraskan dengan partikularitas. Demikian pula, pelarian menuju teologi spiritualitas yang bervisi posmodern di atas merupakan fenomena yang menggambarkan bahwa agama merupakan distingsi modernitas yang berantonim dengan sekte-sekte sebagai produk posmodernitas. Sentralisasi versus desentralisasi mengandung konsep dan muatan wacana yang bisa diterapkan dalam memahami perspektif politik dan kebijakan publik.

Meskipun demokrasi pada satu sisi menggambarkan signifikansi dan relevansinya di sebagian dunia Islam dan masih menjadi problem di sebagian yang lain maka fenomena tersebut menggambarkan kecenderungan bahwa terjadi intensitas yang bersifat dinamis bagi penerapan demokrasi tersebut. Di antara sekian karakteristik

³⁰ Jalaluddin Rakhmat dalam Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1997), 78.

³¹ Luthfie Asy-Syaukanie, "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme" dalam *Jurnal UQ* Vol 1 No 2 tahun 1995, 20–27.

posmodernisme yang digambarkan oleh Ahmed di atas, aspek media massa menduduki peran penting di dalamnya. Dalam konteks hubungan antara Islam dan Barat yang secara dominan diwarnai dengan konflik dan ketegangan, terlepas sebagai justifikasi atas tesis Huntington atau sebaliknya, media mengambil peran penting yang sekaligus memperlihatkan betapa dominasi dan hegemoni via media masih dijalankan oleh Barat. Apa yang disebut Ahmed di atas sebagai kehidupan dalam citra yang diproduksi, memberikan penegasan bahwa suatu klaim atas Islam yang dipresentasikan antara sebagai agama damai atau perang, menggambarkan suatu citra artifisial namun memproduksi opini dengan tingkat kepercayaan tinggi bagi sebagian besar publik dunia. Produksi pencitraan via media dalam struktur global semakin mempertegas kembali bahwa media merupakan perangkat dominasi dan hegemoni. Penegasan serupa pernah dikemukakan oleh Choamski dan juga Goodman yang secara langsung melakukan kajian tentang penataan agenda (*agenda setting*) media yang diberlakukan oleh Barat terhadap dunia ketiga, khususnya dunia Islam.³²

Upaya untuk mempresentasikan fenomena budaya massa (*mass culture*) dalam masyarakat maupun komunitas muslim lebih dilatarbelakangi bahwa sektor ini paling banyak menggambarkan ambivalensi identitas pada satu sisi dan ideologis pada sisi lain. Apa yang digagas oleh Lash bahwa dediferensiasi merupakan prinsip mendasar dalam sosiologi posmodernisme baik sebagai realitas maupun fenomena empiris khususnya dalam masyarakat muslim.³³ Dediferensiasi tersebut menegaskan tentang ketidakberbedaan antara modernitas dan tradisionalitas karena berlaku model ekspresivitas terutama menyangkut pola pikir maupun perilaku kehidupan sosial dan kultural. Dalam konsepsi di atas, identitas antara yang modern dan yang tradisional tidak lagi tampak namun sebaliknya justru ditenggelamkan bagi suatu orientasi dan kepentingan tertentu yang dewasa ini terjadi dalam budaya massa.

³² Amy Goodman dan David Goodman, *The Exception to the Rule: Exposing Oily Politicians, War Profiteers and the Media That Love Them* (New York: Hyperion Books, 2004), 90.

³³ Scott Lash, *Sosiologi Posmodernisme* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 89.

Meski demikian, konsepsi budaya massa tersebut menggambarkan sistem manifestasi kebudayaan yang tidak lepas dari bias ideologis. Beberapa kalangan pemikir yang berlatarbelakang studi budaya (*cultural studies*) misalnya menilai bahwa gagasan fetitisme komoditas atau komodifikasi menjadi salah satu pendekatan kapitalisme dalam memasuki struktur atau kultur posmodernisme. Konsepsi budaya massa yang meski memberikan ruang dan medan bagi dediferensiasi yang secara impresif menggambarkan masyarakat atau komunitas tanpa kelas (*classless society*) dalam terminologi Marxian misalnya, namun pada dasarnya justru membuka lebar lahirnya masyarakat kelas baru (*new class society*). Artikulasi yang sangat filosofis dan imajiner yang dikemukakan oleh Strinati dan Chaney³⁴ misalnya, menegaskan betapa fenomena budaya populer yang terjadi di Barat berikut transmisinya ke dunia ketiga, terutama negara-negara muslim, tidak bisa dilepaskan dari praktik komodifikasi yang melahirkan masyarakat konsumeristik; suatu praktik budaya yang tidak sekedar menggambarkan gaya hidup kapitalis namun juga hedonis.

Posmodernisme dan Kritik Ideologis

Untuk memosisikan media sebagai kekuatan tunggal dalam proyek posmodernisme sejauh ini merupakan langkah tepat meski dengan suatu asumsi bahwa media hanya merupakan salah satu bentuk kekuatan yang mengendalikan proyeksi posmodernisme tersebut. Pandangan ini tentu dipengaruhi oleh Ahmed di atas di mana produksi citra sebagai aspek dominan dalam proyeksi posmodernisme tersebut secara sosiologis, politis dan kultural relatif berhasil bagi konstruksi proyek posmodernitas tersebut, termasuk sebagaimana keberhasilan dalam membangun proyek modernitas pada masa-masa sebelumnya. Meski demikian, peran dan posisi media sebagai saluran narasi partikular yang menjadi karakteristik posmodernisme tentu menampakkan perbedaan mendasar sebagaimana terjadi dalam proyek modernitas termaksud. Media massa menurut Nye sebagaimana dikutip Huntington, merupakan kekuatan lunak (*soft power*) yang menusuk pada arena atau

³⁴ David Chaney, *Lifestyles* (London: Routledge, 1996); Dominic Strinati, *An Introduction to Theories of Popular Culture* (London: Routledge, 2004), 56.

medan kognitif dan psikologis masyarakat.³⁵ Kontekstualisasi peran dan fungsi media sejauh ini merupakan pendekatan penting yang difungsikan oleh Barat di berbagai arena atau medan. Pandangan yang ditegaskan oleh Tehranian dan Said menunjukkan bukti bahwa imperialisme dan kolonialisme politik via media menjadi pendekatan utama Barat untuk bermain dengan citra.³⁶ Demikian halnya dengan fenomena atau realitas budaya massa berikut kecenderungan ke arah terbangunnya masyarakat konsumerisme yang disebut dengan masyarakat komoditas misalnya, menegaskan bahwa dunia citra yang dipresentasikan melalui serangkaian tanda-tanda menggambarkan pola permainan kognisi dan imajinasi individu maupun komunitas dalam struktur atau komunitas sosial yang demikian luas.

Dengan memosisikan media sebagai aktor utama bagi proyeksi posmodernisme baik di Indonesia maupun dunia ketiga, khususnya dunia Islam yang punya pengalaman tersendiri dengan Barat, maka kritik ideologis yang muncul sejauh ini lebih menekankan perhatian maupun pendekatan yang berangkat dari posisi media tersebut. Dalam tradisi komunikasi misalnya, pembingkaihan dan penataan agenda (*framing and agenda setting*)³⁷ serta retorika³⁸ merupakan sekian pendekatan yang difungsikan dalam melakukan kritik ideologis atas proyek modernitas dan posmodernitas. Baik Said maupun Tehranian merupakan dua dari sekian banyak pemikir yang berkonsentrasi pada kekuatan media Barat dalam

³⁵ Samuel P Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (New York: Simon and Schuster, 1996), 34.

³⁶ Idy S Ibrahim, ed, *Media dan Citra Muslim* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), Edward Said, *Covering Islam* (New York: Random House, 1997), 26.

³⁷ Pembingkaihan (*framing*) dalam tradisi komunikasi dikembangkan oleh Erving Goffman yang menegaskan bahwa suatu berita atau informasi tidak lepas dari pembingkaihan yang dilakukan oleh pihak media. Pembingkaihan menjadi salah unsur pembeda antara satu media dengan media lain yang direpresentasikan melalui penulisan berita, struktur bahasa atau linguistik berikut kecenderungan naratif didalamnya. Pembingkaihan lahir dari aspek atau kecenderungan ideologis yang demikian kompleks. Lebih jauh tentang pendekatan tersebut, lihat Erving Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* (New York: Harper & Row, 1974).

³⁸ Marc Lynch, *Rhetoric and Reality: Countering Terrorism in the Age of Obama* (New York: Center for American Security, 2010), 78.

membangun opini, persepsi dan manipulasi melalui serangkaian tanda-tanda yang diekspresikan via media massa.³⁹ Proses kritik ideologis berikut pendekatan yang difungsikan berangkat dari pijakan beberapa perspektif kritis maupun kajian budaya (*cultural studies*) yang dewasa ini menjadi simbol utama dalam tradisi pemikiran posmodernisme. Dari kritik ideologis tersebut maka posisi posmodernisme, sebagaimana dikemukakan oleh Baudrillard⁴⁰, tidak jauh menggambarkan berbagai praktik yang dilakukan oleh modernitas meski mendasarkan pada basis epistemologis dan ontologis yang bermula dari kritik atas pencerahan hingga lahirnya budaya massa.

Dari beberapa pendekatan yang dikemukakan di atas maka kritik ideologis terhadap posmodernisme khususnya atas media sebagai produsen citra yang bersifat virtual, memberikan suatu konfirmasi bahwa proyek posmodernisme dalam taraf tertentu menggambarkan bentuk kelanjutan atas kapitalisme. Meski demikian, diperlukan suatu langkah dan upaya lebih lanjut dalam mempertimbangkan asumsi di atas. Kritik atas posmodernisme dalam perspektif ideologis menegaskan bahwa orientasi kapitalisme yang dipresentasikan via media oleh kekuatan Barat menggambarkan berbagai diferensiasi sebagaimana yang terjadi melalui proyek modernitas. Pendekatan imagologis yang integral dengan kekuatan media memberikan justifikasi atas pengaruh terhadap hasrat dan kesadaran sebagaimana menjadi wacana utama sebagian pemikir berhaluan posmodernis di atas. Di sini, kapitalisme secara ideologis menggambarkan bentuk perluasan ekspansi dari yang semula bersifat fisik dan politis kemudian berubah bersifat psikologis dengan memosisikan media sebagai penopang utama proyek kapitalisme tersebut.

Penutup

Periode atau aktivitas sejarah yang dimulai dari tradisionalisme, modernisme dan posmodernisme berikut berbagai karakteristik yang

³⁹ Lihat, Arhur Asa Berger, *Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising's Impact on American Character and Society* (New York: Rowman & Littlefield, 2011), 24.

⁴⁰ Jean Baudrillard, *Lupakan Posmodernisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 67.

terkandung di dalamnya kerap dipahami sebagai proses yang berjalan secara linear pada satu sisi dan sirkuler pada sisi lain. Dua pandangan terhadap posmodernisme, yakni sikap skeptis dan afirmatif, masing-masing memperlihatkan kecenderungan tersebut. Kaum skeptis menilai posmodernisme sebagai periode dan aktivitas sejarah yang menggambarkan protes dan perlawanan atas produk modernitas yang melingkupi berbagai persoalan yang demikian kompleks. Sebaliknya, sikap afirmatif menggambarkan kecenderungan bahwa posmodernisme merupakan kelanjutan dari proyek modernisme Barat berikut karakteristik yang digambarkan. Baik sikap skeptis maupun afirmatif sejauh ini memang tidak bisa digeneralisasi sebagai kecenderungan yang bersifat universal. Dengan demikian, upaya untuk memosisikan posmodernisme di antara dua pilihan tersebut pada akhirnya dijawab oleh beberapa karakteristik yang dicerminkan oleh posmodernisme tersebut, khususnya melalui deskripsi yang dikemukakan oleh Ahmed di atas. Dalam konteks filsafat dan ilmu pengetahuan, positivisme sebagai paradigma modernitas pada kenyataannya masih berjalan dan dalam wilayah tertentu, mencapai momentumnya. Meski demikian, kecenderungan paradigma yang berpayung pada fenomenologi dan hermeneutika sebagai lawan positivisme juga mengalami perkembangan signifikan.

Simbolisasi kapitalisme dalam gaya hidup dan budaya populer sebagaimana ditegaskan oleh Chaney misalnya, mencerminkan terjadinya perpanjangan nalar modernitas yang tidak saja dinikmati oleh kaum borjuis dalam terminologi Marxian, namun juga mengalami penyebaran terhadap masyarakat luas. Istilah masyarakat konsumen atau komoditas misalnya, tidak lagi menggambarkan dominasi simbolik oleh kaum borjuis atau kapitalis namun juga menjadi budaya massa (*mass culture*) akibat intervensi media. Di sini terjadi apa yang disebut oleh Raymond Williams sebagai struktur perasaan (*structure of feeling*) yang berpusat pada subjek untuk mengekspresikan gaya hidup yang dikehendaki. Sementara bagi Giddens, era budaya massa berikut simbolisasi borjuisme oleh kaum kapitalis dalam era konsumerisme mengandaikan suatu perpanjangan hasrat dan nalar hedonisme sebagaimana terkandung dalam modernitas. Bagi masyarakat komoditas, suatu barang atau benda sebagai reifikasi kapitalisme tidak sekedar sebagai kebutuhan namun juga kepantasan dan

kemewahan. Dari gambaran ini, maka baik modernisme maupun posmodernisme semakin menampakkan ambivalensi dan keduanya justru semakin menyatu dalam tanda-tanda yang diciptakan bersama. Tanda kebudayaan populer yang diproduksi oleh kapitalisme untuk membangun masyarakat komoditas tidak lagi diorientasikan pada suatu kelas tertentu namun sebaliknya, mengonstruksi suatu budaya massa yang bersifat terbuka.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Akbar S. *Posmodernisme: Bahaya dan Harapan Bagi Islam*, terj. M Sirozi. Bandung: Mizan, 1996.
- Alatas, Farid. *Wacana Alternatif dalam Ilmu-ilmu Sosial*. Bandung: Mizan, 2007.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1997.
- Asy-Syaukanie, Luthfie. "Islam dalam Konteks Pemikiran Pasca Modernisme" dalam *Jurnal UQ* Vol 1 No 2, 1995.
- Azra, Azyyumardi. "Pasca Modernisme, Islam dan Politik: Kecenderungan dan Relevansi" dalam *Jurnal UQ* Vol. 1 No 2, 1995.
- Baudrillard, Jean. *Lupakan Posmodernisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Berger, Arthur Asa. *Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising's Impact on American Character and Society*. New York: Rowman & Littlefield, 2011.
- Cahoone, Lawrence E. *From Modernism to Postmodernism*. Cambridge: Blackwell Publisher, 1996.
- Chaney, David. *Lifestyles*. London: Routledge, 1996.
- Fromm, Eric. *Revolusi Harapan*, terj. Kamdani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.

- Fromm, Eric. *Marxist Theory of Man*. London: Polity Press, 2004.
- Goffman, Erving. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. New York: Harper & Row, 1974.
- Goodman, Amy dan Goodman, David. *The Exception to the Rulers: Exposing Oily Politicians, War Profiteers and the Media That Love Them*. New York: Hyperion Books, 2011.
- Griffin, David Ray, (ed.). *God and Religion in the Postmodern World*. Albany: State University of New York Press, 1989.
- Griffin, David Ray. *Visi-Visi Posmodern: Spiritualitas dan Masyarakat*, terj. Gunawan A. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Habermas, Jurgen. *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, terj. Hasan Basri. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Habermas, Jurgen. *The Philosophical Discourse of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1987.
- Hall, Stuart, Held, David dan Hubert, Don and Thompson, Kenneth, (ed.). *Modernity : An Introduction to Modern Societies*. Cambridge: Blackwell Publisher, 1996.
- Hardiman, F Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hardiman, F Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- _____. *Filsafat Modern*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Hekman, SJ. *Hermeneutics and the Sociology of Knowledge*. Cambridge and Oxford: Polity Press, 1986.
- Hindes, B. *Philosophy and the Methodology of Social Sciences*. Sussex: The Harvester Press, 1977.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster, 1996.
- Ibrahim, Idy S, (ed.). *Media dan Citra Muslim*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Kung, Huns. *Theology for the Third Millenium*. New York: Doubleday Publishing, 1989.

- Kung, Huns. "Towards a World Ethic of World Religion: Fundamental Questions of Present-Day Ethics in a Global Context" dalam *Concilium* 2, 1990.
- Kung, Huns. *Etika Ekonomi Politik Global*, terj. A Noer Zaman. Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Lynch, Marc. *Rhetoric and Reality: Countering Terrorism in the Age of Obama*. New York: Center for American Security, 2010.
- O'Donnell, Kevin. *Postmodernism*. Oxford: Lion Publishing, 2003.
- Said, Edward W. *Covering Islam*. New York: Random House, 1997.
- Sarup, Madan. *An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism*. Georgia: The University of Georgia Press, 1993.
- Strinati, Dominic. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. London: Routledge, 2004.
- Sugiharto, Bambang. *Posmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Suseno, Frans Magnis. *Pijar-pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Turner, Bryan S. *Teori teori Sosiologi Modernitas dan Posmodernitas*, terj. Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.